

Perancangan Sistem Informasi Pemeringkatan Bumdes Berbasis Android Menggunakan Php dan Mysql Studi Kasus Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nisa Novita Sari¹, Chairullah Naury², Budi Riyanto Prabowo³

^{1,2} Manajemen Informatika, Politeknik Assalaam Surakarta, Surakarta, Indonesia

³ Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sapta Mandiri, Balangan, Indonesia

E-mail: ¹nisanovitasari81@gmail.com*, ²ch.naury@gmail.com, ³brp@univsm.ac.id

*Corresponding Author

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi cara pemerintahan beroperasi, dengan implementasi teknologi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki tugas meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa. Namun, dalam penilaian pemeringkatan BUMDesa masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis mencoba membuat aplikasi pemeringkatan BUMDesa yang dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Tujuan penulis adalah untuk membuat aplikasi yang dapat memudahkan pelaporan dan monitoring, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan mengoptimalkan pemeringkatan Bumdes. Dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai teknologi dasar, aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja BUMDesa dan meningkatkan kesejahteraan desa.

Kata Kunci: *Sistem Informasi, Pemeringkatan, PHP, MySql*



Copyright © 2025 The Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor, termasuk dunia pemerintahan. Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintahan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan penyusunan laporan. Teknologi informasi mampu merombak sistem pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Implementasi teknologi informasi di lingkungan pemerintahan memegang peranan penting dalam mempermudah berbagai aspek pelayanan publik, menghadirkan nilai strategis, dan mengatasi tantangan dalam mengubah budaya kerja menjadi lebih baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DPMD HST) memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Salah satu fungsi utama DPMD HST adalah meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan dalam proses pembangunan desa atau kelurahan.

Kecepatan pengolahan data dan penyampaian informasi memiliki peran yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintahan. Pengolahan data dengan jumlah besar secara manual tidak lagi efektif. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang mampu melakukan perhitungan dan penyampaian data dengan cepat. Keunggulan komputer dalam memproses data dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, serta efisiensi suatu aplikasi (Famukhit, 2014).

Dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa/usaha milik desa bersama. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, DPMD HST menghadapi permasalahan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (PUEMD), khususnya dalam penilaian dan pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang masih dilakukan secara manual. Akses jalan yang sulit dan waktu yang tidak mendukung turut mengurangi efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk merancang sistem informasi penilaian pemeringkatan BUMDesa berbasis Android menggunakan PHP dan MySQL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sistem informasi ini diharapkan dapat membuat aplikasi yang dapat memudahkan pelaporan dan monitoring, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan mengoptimalkan pemeringkatan BUMDesa. Dengan adanya parameter atau indikator tertentu, aplikasi ini dapat membantu menilai sejauh mana BUMDesa telah mencapai tujuan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

METODE

Penulis menggunakan metode pengumpulan data serta metode *System Development Life Cycle (SDLC)* untuk perancangan pengembangan sistem informasi.

Tahapan pengumpulan data memiliki peran yang sangat vital dalam proses analisis kebutuhan untuk pengembangan sistem yang dibutuhkan. Pengumpulan data mencakup langkah-langkah berikut ini:

a. Observasi

Pada tahap observasi, dilakukan pengamatan langsung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah guna mengidentifikasi permasalahan yang ada serta topik-topik yang akan diteliti untuk melakukan pengecekan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu tanya jawab secara langsung kepada bapak kepala bidang PUEMD mengenai kendala dan kriteria yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini.

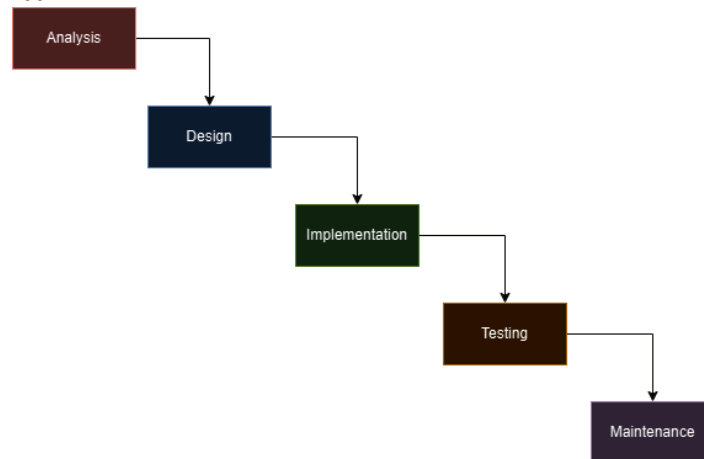
c. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan untuk mencari informasi dan referensi yang mendukung penelitian, berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Dari tahap Studi Pustaka ini, banyak landasan teori yang dapat membantu penelitian ini dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Penulis menggunakan metode *System Development Life Cycle (SDLC)* dalam Perancangan Sistem Informasi Pemeringkatan Bumdes Berbasis Android Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Model SDLC yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah model *Waterfall*. *Waterfall* adalah model pengembangan sistem yang setiap tahapnya harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh sebelum diteruskan ke tahap berikutnya untuk menghindari terjadinya pengulangan tahapan (Hidayat & Ardiansyah, 2022).

Metode Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang diibaratkan seperti air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Metode ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu : analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan (Helling & Nasution, 2023).

Pada penelitian ini penulis menyusun langkah-langkah metode SDLC yang disajikan dalam bentuk diagram Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

1. Analysis

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah terkait proses penilaian untuk pemeringkatan bumdes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya, sebuah analisis dilakukan terhadap kebutuhan dalam pengembangan perangkat lunak dengan menganalisis kendala dan kriteria dalam proses penilaian pemeringkatan bumdes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Design

Tahap selanjutnya yaitu Desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. Sehingga membantu menspesifikasi kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan (Olindo & Syaripudin, 2022).

3. Implementation

Tahap pengkodean, di mana proses pengkodean dilakukan di sini, desain database dan antarmuka dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman, membuat sistem yang memberikan output tetapi tidak diketahui apakah itu benar atau salah.

4. Testing

Tahap pengujian di mana program diuji syntax dan logikanya diuji menggunakan *black box* untuk memastikan seluruh fungsinya berjalan dengan benar.

Black box testing aplikasi point of sales post oleh danendra kansa, Testing merupakan tahapan evaluasi yang bertujuan untuk menentukan kenyamanan pengguna dalam menggunakan perangkat lunak berdasarkan metrik tertentu. Di sisi lain, menurut sumber lain, pengujian atau pengujian sangat penting karena tujuan pengujian adalah untuk memastikan kualitas perangkat lunak, dan juga dapat menjadi pemeriksaan akhir pengkodean, desain, dan spesifikasi (Praniffa et al., 2023).

5. Maintenance

Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Disamping itu dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk : a) Perbaikan kesalahan. b)

Perbaikan implementasi unit sistem. c) Peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru (Ridoh & Putra, 2021).

Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi tetap dapat digunakan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ini karena, setelah beberapa waktu, pengguna mungkin ingin mengubah sesuatu dan membutuhkan fitur baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, jika suatu *BUMDesa* mencapai nilai yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa *BUMDesa* tersebut merupakan *BUMDesa* kategori Maju. Sebaliknya, jika *BUMDesa* mendapatkan nilai yang rendah, maka dapat disimpulkan bahwa *BUMDesa* tersebut termasuk dalam kategori Perintis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode pengumpulan data dan pengembangan perangkat lunak menggunakan model *Waterfall* dari *System Development Life Cycle* (SDLC).

Analysis

A. Jumlah Kriteria

Dalam pengumpulan data dapat di jelaskan bahwa kegunaannya ialah untuk menentukan pemeringkatan bumdes yang terdiri dari 3 kategori, dengan 19 kriteria. Adapun penentuan sub kriteria juga di sertai bobot dari kriteria tersebut. Berikut sub kriteria yang dimiliki masing-masing kriteria yang di gunakan:

1. Kriteria Proses Pendirian BUMDesa

Kriteria ini dapat dilihat dari proses pendirian.

Tabel 1. Proses Pendirian BUMDesa

Kriteria		Nilai
1.	Pendirian Bumdesa tidak melalui Musdes dan tidak ada dokumen	2
2.	Pendirian Bumdesa melalui Musdes, tanpa kajian usaha, Tim Pembentukan perumus dan tidak ada dokumen	3
3.	Pendirian Bumdesa melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes dan tidak didukung dokumen yang lengkap	4
4.	Pendirian Bumdesa melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes dan didukung dokumen yang lengkap	5

2. Kriteria Struktur Organisasi

Kriteria ini dapat dilihat struktur organisasi yang ada.

Tabel 2. Struktur Organisasi

Kriteria		Nilai
1.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional belum terbentuk	2
2.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional terbentuk sebagian	3
3.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk	4
4.	Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk dan memiliki karyawan/staf	5

3. Kriteria Kepengurusan

Kriteria ini dapat dilihat dari kepengurusan.

Tabel 3. Kepengurusan

Kriteria		Nilai
1.	Pengurus, belum ditetapkan dengan SK Kades	2
2.	Pengurus ditetapkan SK Kades tapi belum melaksanakan kegiatan	3
3.	Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan sebagian	4
4.	Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan seluruhnya sesuai job deskripsi.	5

4. Kriteria Tupoksi

Kriteria ini dapat dilihat dari tupoksi.

Tabel 4. Tupoksi

Kriteria		Nilai
1.	Tupoksi belum dijalankan oleh Penasehat, Badan pelaksana dan Pelaksana operasional	2
2.	Tupoksi hanya dijalankan oleh salah satu organ struktur organisasi (Penasehat, Badan pelaksana dan Pelaksana operasional)	3
3.	Tupoksi hanya dijalankan oleh dua organ struktur organisasi (Penasehat, Badan pelaksana dan Pelaksana operasional)	4
4.	Semua organ struktur organisasi (Penasehat, Badan pelaksana dan Pelaksana operasional) sudah menjalankan tupoksi secara benar	5

5. Kriteria Kerjasama

Kriteria ini dapat dilihat dari kerjasama.

Tabel 5. Kerjasama

Kriteria		Nilai
1.	BUMDesa belum melaksanakan kerjasama	2
2.	BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke tiga	3
3.	BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke tiga untuk pengembangan usaha	4
4.	BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa dan pihak ke tiga untuk pengembangan usaha	5

6. Kriteria Program Kerja

Kriteria ini dapat dilihat dari program kerja.

Tabel 6. Program Kerja

Kriteria		Nilai
1.	Tidak ada program kerja	2
2.	Memiliki program kerja tapi tidak dilaksanakan	3
3.	Ada program kerja dan dilaksanakan sebagian	4
4.	Ada program kerja dan sudah dilaksanakan semuanya	5

7. Kriteria Peraturan BUMDesa

Kriteria ini dapat dilihat dari peraturan atau aturan peraturan BUMDesa.

Tabel 7. Peraturan BUMDesa

Kriteria		Nilai
1.	Bumdesa hanya memiliki Perdes dan SK Kades	2
2.	Bumdesa memiliki Perdes, SK Kades dan AD ART	3
3.	Bumdesa memiliki Perdes, SK Kades dan AD ART, SOP	4
4.	Bumdesa memiliki Perdes, AD-ART, SK Kades, SOP dan Unit Usaha berbadan Hukum	5

8. Kriteria Unit Usaha

Kriteria ini dapat dilihat dari berapa unit usaha yang berjalan.

Tabel 8. Unit Usaha

Kriteria		Nilai
1.	Mempunyai 1 unit usaha belum berjalan	2
2.	Mempunyai 1 unit usaha telah berjalan	3
3.	Mempunyai lebih dari 1 unit usaha telah berjalan sebagian	4
4.	Mempunyai lebih dari 1 unit usaha semuanya berjalan	5

9. Kriteria Pasar

Kriteria ini dapat dilihat dari aspek tingkat pemasaran.

Tabel 9. Pasar

Kriteria		Nilai
1.	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di lokal Desa	2
2.	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kecamatan	3
3.	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kabupaten dan atau Provinsi	4
4.	Produk Usaha BUMDesa sudah go publik (nasional dan internasional)	5

10. Kriteria Keberlanjutan

Kriteria ini dapat tingkat keberlanjutan usaha.

Tabel 10. Keberlanjutan

Kriteria		Nilai
1.	Usaha tidak berbasis potensi Desa, tidak prospek dan kurang dukungan Pemdes dan masyarakat.	2
2.	Usaha berbasis potensi Desa, tidak prospek tapi kurang dukungan oleh Pemdes dan masyarakat	3
3.	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan di dukung oleh Pemdes dan masyarakat	4
4.	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan di dukung penuh oleh Pemdes, masyarakat dan stakeholder lainnya	5

11. Kriteria Pembukuan

Kriteria ini dapat dilihat Administrasi atau pembukuan bumdesa.

Tabel 11. Pembukuan

Kriteria		Nilai
1.	Administrasi dan Pembukuan belum dikerjakan	2
2.	Administrasi dan Pembukuan masih sederhana dan belum tertib	3
3.	Pengelolaan Administrasi dan pembukuan cukup memadai telah dilaksanakan tetapi belum tertib	4
4.	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan telah memadai, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan	5

12. Kriteria Laporan

Kriteria ini dapat dilihat dari pelaporan.

Tabel 12. Laporan

Kriteria		Nilai
1.	Tidak ada laporan secara rutin	2
2.	Hanya membuat salah satu Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) secara rutin	3
3.	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat lengkap dan rutin setiap bulan.	4
4.	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat rutin, setiap bulan sudah berbasis teknologi informasi/Komputer	5

13. Kriteria Pertanggungjawaban

Kriteria ini dapat dilihat dari pertanggungjawaban.

Tabel 13. Pertanggungjawaban

Kriteria		Nilai
1.	Pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan usaha tidak dilakukan melalui musdes	2
2.	Melaksanakan pertanggungjawab melalui musdes setahun sekali kurang didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha	3
3.	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun dan didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha	4
4.	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun dan didukung laporan hasil audit keuangan dan perkembangan usaha	5

14. Kriteria Modal

Kriteria ini dapat dilihat dari permodalan bumdesa.

Tabel 14. Modal

Kriteria		Nilai
1.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa	2
2.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa dan penyertaan masyarakat	3
3.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan masyarakat dan Hibah	4
4.	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan masyarakat, Hibah dan Kerjasama dengan pihak ke Tiga	5

15. Kriteria Inventaris

Kriteria ini dapat dilihat dari inventaris bumdesa.

Tabel 15. Inventaris

Kriteria		Nilai
1.	Belum memiliki kantor permanen dan inventaris kantor	2
2.	Sudah memiliki Inventaris Kantor atau memiliki Kantor tapi masih sewa/pinjam	3
3.	Sudah memiliki kantor permanen dan inventaris kantor	4
4.	Sudah memiliki kantor permanen, inventaris kantor dan aset tetap lainnya	5

16. Kriteria Aset

Kriteria ini dinilai dari jumlah kepemilikan aset.

Tabel 16. Aset

Kriteria		Nilai
1.	Jumlah asset Kurang dari 200 Juta	2
2.	Jumlah asset lebih dari 200 Juta dan kurang dari 500 Juta	3
3.	Jumlah asset lebih dari 500 Juta sampai dengan 1 milyar	4
4.	Jumlah asset lebih dari 1 milyar	5

17. Kriteria Dampak Ekonomi

Kriteria ini dinilai dari dampak ekonomi setelah adanya bumdesa.

Tabel 17. Dampak Ekonomi

Kriteria		Nilai
1.	Kegiatan BUMDesa menggerus/menutup usaha yang ada masyarakat	2
2.	Kegiatan BUMDesa merugikan usaha yang ada dimasyarakat	3
3.	Kegiatan BUMDesa bersinergi/menguatkan usaha yang ada di masyarakat	4
4.	Kegiatan BUMDesa bekerjasama dan memberi keuntungan usaha yang ada dimasyarakat	5

18. Kriteria Dampak Sosial

Kriteria ini dapat dilihat dari dampak sosial setelah adanya bumdesa.

Tabel 18. Dampak Sosial

Kriteria		Nilai
1.	BUMDesa tidak memberikan dampak sosial	2
2.	BUMDesa memberi dampak penyediaan lapangan kerja	3
3.	BUMDesa memberi dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat	4
4.	BUMDesa memberi dampak terhadap penyediaan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat	5

19. Kriteria Dampak Bagi Pembangunan Desa

Kriteria ini dapat dinilai dampak pembangunan setelah adanya bumdesa.

Tabel 19. Dampak Bagi Pembangunan Desa

Kriteria		Nilai
1.	BUMDesa belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa	2
2.	BUMDesa Sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa	3

3.	BUMDesa Sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan masyarakat	4
4.	BUMDesa Sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa, masyarakat dan pihak ketiga	5

B. Nilai Normalisasi Bobot Kriteria

Adapaun rumus nilai normalisasi bobot dalam menentukan bobot penilaian pemeringkatan, maka disini penulis memberikan pembobotan angka pada setiap pemilihan jawaban dan pengelompokan kategori, dengan keterangan sebagai berikut:

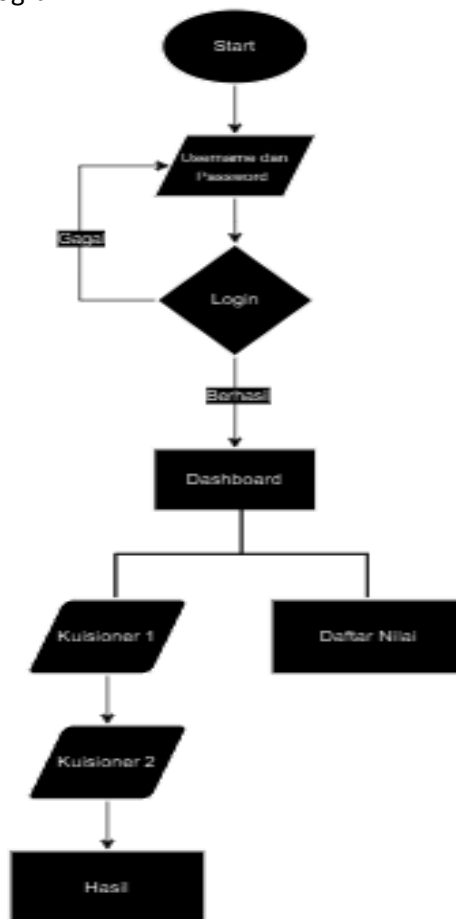
Nilai	Kategori
77 sampai dengan 95	Maju
58 sampai dengan 76	Berkembang
38 sampai dengan 57	Perintis

Design

Beberapa langkah desain yang akan diambil dalam perancangan sistem ini meliputi:

a. Flowchart

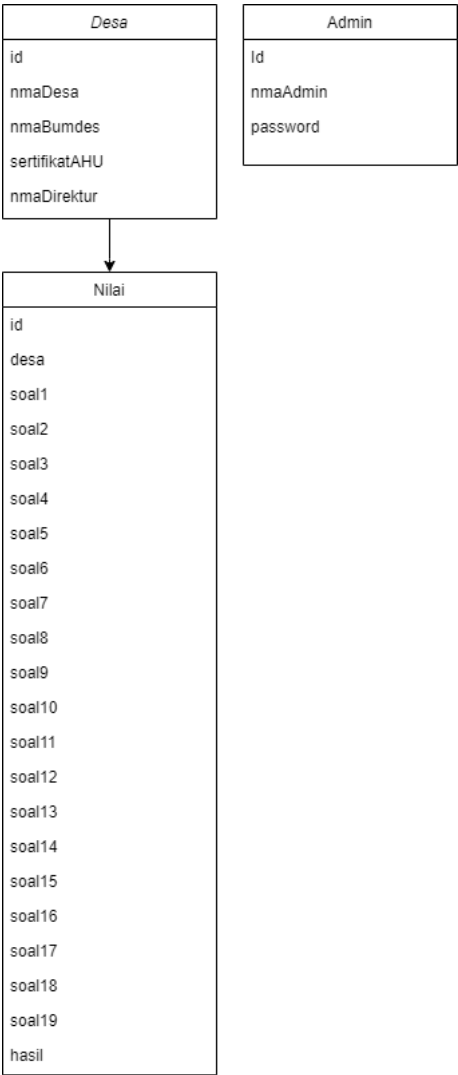
Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program.



Gambar 2. Flowchart

b. Class Diagram

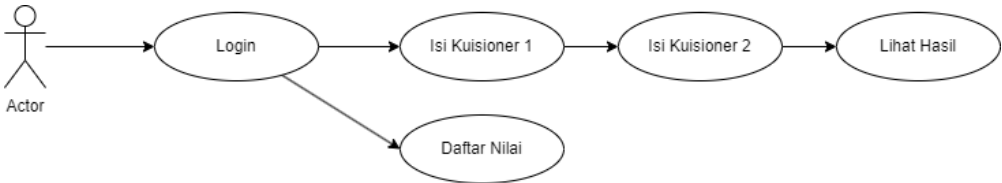
Class Diagram dipergunakan buat menampilkan Kelas-kelas serta paket-paket pada dalam system. Class Diagram menyampaikan ilustrasi system Secara tidak aktif serta rekanan antar mereka (Hafsari et al., 2023).



Gambar 3. Class Diagram

c. Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (user) dan sistem dalam suatu lingkungan tertentu. Use case diagram digunakan untuk merepresentasikan fungsionalitas sistem secara visual, sehingga memudahkan pemahaman dan komunikasi antara pengembang perangkat lunak dengan klien atau pengguna (Pranoto et al., 2024).



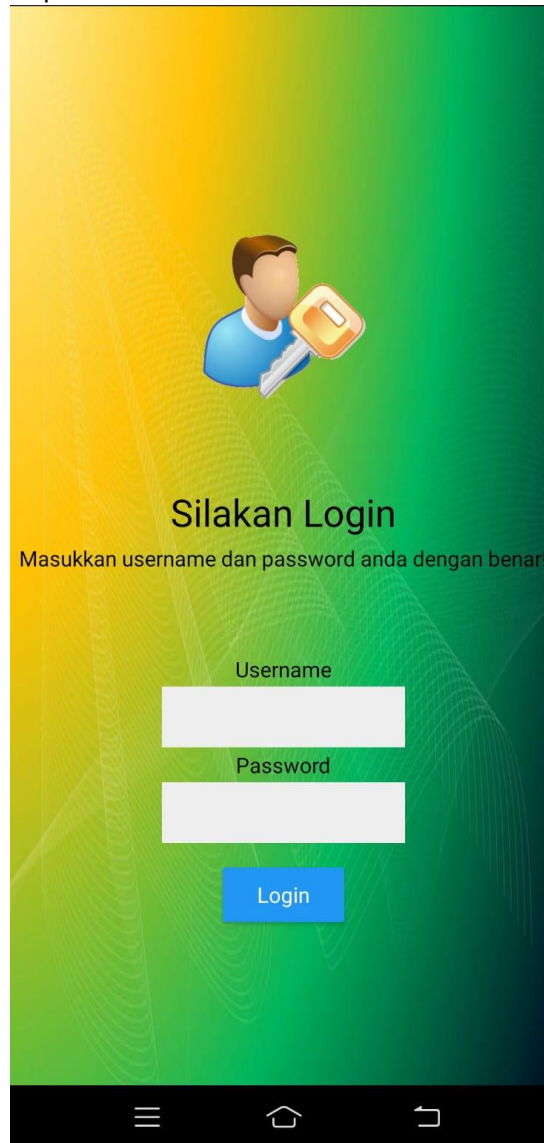
Gambar 4. Use Case Diagram

Implementation

Implentasi sistem informasi pemeringkatan Bumdes berbasis android ini, dipilih menggunakan Bahasa pemrograman PHP untuk membangun sistemnya. Selain itu, digunakan juga MySQL sebagai sistem berbasis data untuk mendukung pengelolaan data.

1. Tampilan Login

Tampilan login merupakan tampilan awal yang muncul ketika admin hendak mengakses sistem informasi pemeringkatan bumdes, di mana admin harus memasukkan *username* dan *password* untuk dapat masuk ke dalam sistem.



Gambar 5. Tampilan Login

2. Tampilan Dashboard

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard*, yang mana disana terdapat 2 menu pilihan.



Gambar 6. Tampilan Dashboard

3. Tampilan Kuisisioner 1

Pada tampilan kuisisioner 1, admin harus memasukan data bumdes.

Silahkan Masukan Data

Nama Desa

Nama BUMDesa

Nomor Sertifikat A.H.U

Nama Direktur

Selanjutnya

k 0

Gambar 7. Tampilan Kuisisioner 1

4. Tampilan Kuisisioner 2

Pada tampilan kuisisioner 2 berisi beberapa pertanyaan untuk penilaian pemeringkatan.

Koesioner

PROSES PENDIRIAN BUMDesa

☐ Pendirian Bumdesa tidak melalui Musdes dan tidak ada dokumen

☐ Pendirian Bumdesa melalui Musdes, Tanpa Kajian Usaha, Tim Pembentukan Perumus dan tidak ada dokumen

☐ Pendirian Bumdesa melalui persiapan/ pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes dan tidak didukung dokumen yang lengkap

☐ Pendirian Bumdesa melalui peresiapan/ pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes dan didukung dokumen yang lengkap

STRUKTUR ORGANISASI

☐ Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional belum terbentuk

☐ Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional terbentuk sebagian

☐ Penasehat, Pengawas dan Pelaksana sudah terbentuk

☐ Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk dan memiliki karyawan/staff

k (1)

Gambar 8. Tampilan Kuisisioner 2

5. Tampilan Daftar Nilai

Tampilan daftar nilai ini berisi nama desa dan nilai yang diperoleh setelah melakukan penilaian pemeringkatan.



Nama Desa	Nilai Akhir
Penghambat Hilir Luar	44
nbnjj	57
Kapar	57
A	72
Sungai Rangas	29
Tangkarau	42
Pandawan	29
Bulau	51
Mandingin	53
---	---



Gambar 9. Tampilan Daftarl Nilai

Testing

Terakhir dilakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem yang telah dibangun. Pengujian sistem ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode *blackbox testing*. Dibawah ini adalah hasil dari proses pengujian sistem menggunakan metode *blackbox testing*.

No.	Skenario Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Kesimpulan
1.	Menginputkan data login berupa <i>username</i> dan <i>password</i> untuk admin	Menampilkan halaman dashboard admin	Valid
2.	Admin menekan tombol "Kuisisioner"	Menampilkan halaman Kuisisioner 1	Valid
3.	Admin menginputkan informasi yang diperlukan mengenai bumdes, lalu tekan tombol "Selanjutnya"	Menampilkan halaman Kuisisioner 2	Valid
4.	Admin mengisi semua keperluan penilaian, tekan tombol "Selesai" untuk menyimpan hasil pengisian tersebut	Hasil kategori berhasil muncul	Valid
5.	Admin menekan tombol "Daftar Nilai"	Menampilkan halaman Daftar Nilai	Valid
6.	Menekan tombol "Logout" untuk mengakhiri sesi dan keluar	Berhasil keluar dan kembali ke halaman login	Valid

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian pemeringkatan, terdapat beberapa kriteria yang digunakan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi Proses Pendirian, Struktur Organisasi, Kepengurusan, Tupoksi, Kerjasama, Program Kerja, Peraturan BUMDesa, Unit Usaha, Pasar, Keberlanjutan, Pembukuan, Laporan, Pertanggungjawaban, Modal, Inventaris, Aset, Dampak Ekonomi, Dampak Sosial, dan Dampak Bagi Pembangunan Desa. Penerapan sistem informasi pemeringkatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penilaian pemeringkatan. Sistem informasi ini memungkinkan pengukuran kinerja Bumdesa secara objektif. Dengan adanya parameter atau indikator tertentu, aplikasi dapat membantu menilai sejauh mana Bumdesa telah mencapai tujuan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Famukhit, K. A. S. & M. L. (2014). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada MTs Guppi Jetiskidul. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, 3(4), 60.
- Hafsari, R., Aribi, E., & Maulana, N. (2023). Perancangan Sistem Informasi Manajemen

- Inventori Dan Penjualan Pada Perusahaan Pt.Inhutani V. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer*, 10(2), 109–116.
<https://doi.org/10.30656/prosisko.v10i2.7001>
- Helling, L. S., & Nasution, A. (2023). Metode Waterfall Pada Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Di Fast Clean Bogor. *Journal of Accounting Information System*, 4(2), 4–14. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jais8>
- Hidayat, F., & Ardhiansyah, M. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Menggunakan Model Waterfall (Studi Kasus: Poliklinik PUSDIKLAT). *Scientia Sacra: Jurnal Sains*, 2(2), 545–554.
- Olindo, V., & Syaripudin, A. (2022). Perancangan Sistem Informasi Absensi Pegawai Berbasis Web Dengan Metode Waterfall. *OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer Dan Science*, 1(1), 17–26.
- Praniffa, A. C., Syahri, A., Sandes, F., Fariha, U., Giansyah, Q. A., & Hamzah, M. L. (2023). Pengujian Black Box Dan White Box Sistem Informasi Parkir Berbasis Web Black Box and White Box Testing of Web-Based Parking Information System. *Jurnal Testing Dan Implementasi Sistem Informasi*, 1(1), 1–16.
- Pranoto, S., Sutiono, S., Sarifudin, & Nasution, D. (2024). Penerapan UML Dalam Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 384–401. <https://qjurnal.my.id/index.php/sur/article/view/866>
- Ridoh, A., & Putra, Y. I. (2021). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Dokumen Layanan Publik Berbasis Web Untuk Mempermudah Masyarakat Memperoleh Informasi Pada Pemerintah Kabupaten Bungo. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 4227–4235.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1525>